

Kinerja Logistik Nasional sebagai Enabler Utama Strategi Pembangunan Menghadapi Dinamika Global



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SIARAN PERS

HM.02.04/25/SET.M.EKON.3/01/2026

Kinerja Logistik Nasional sebagai Enabler Utama Strategi Pembangunan Menghadapi Dinamika Global

Jakarta, 30 Januari 2025

Meningkatnya tensi geopolitik global masih menimbulkan berbagai tantangan dan ketidakpastian perekonomian dunia yang berdampak langsung pada kelancaran rantai pasok global. Kebijakan tarif resiprok, konfrontasi geoekonomi, serta fragmentasi ekonomi akibat proteksionisme turut meningkatkan risiko dan biaya logistik lintas negara. Dalam kondisi tersebut, Pemerintah memastikan resiliensi ekonomi Indonesia tetap terjaga melalui penguatan sistem logistik nasional yang semakin efisien, terintegrasi, dan adaptif dalam merespons dinamika global.

“Logistik menjadi kunci utama, pada saat terjadi dinamika geopolitik global selalu yang terpengaruh duluan adalah masalah logistik supply chain dan itu ongkosnya sangat mahal sekali,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam kegiatan Economic Outlook 2026 sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) yang bertajuk “2 Dekade Bersama APJP untuk Indonesia: Membangun Kemandirian Ekonomi & Mewujudkan Asta Cita” yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (29/01).

Kegiatan diselenggarakan secara *hybrid* dan dihadiri oleh peserta yang terdiri dari pengurus dan pimpinan perusahaan anggota APJP, Kementerian/Lembaga, asosiasi, media, serta diikuti secara daring oleh perusahaan non-APJP. Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) merupakan wadah bagi perusahaan pemegang fasilitas Mitra Utama (MITA) Kepabeanan dan *Authorized Economic Operator* (AEO) di Indonesia yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan risiko rendah dalam kegiatan ekspor-impor. Asosiasi APJP berperan sebagai mitra strategis Pemerintah dalam mendukung kelancaran arus barang, peningkatan efisiensi proses kepabeanan, serta penguatan sistem logistik nasional melalui komunikasi dua arah dan penyampaian masukan kebijakan berbasis pengalaman pelaku usaha.

Lebih lanjut, dalam sesi diskusi panel, Sesmenko Susiwijono menyampaikan bahwa penguatan kinerja logistik nasional merupakan bagian dari enabler utama dalam strategi pembangunan ekonomi nasional yang dijalankan melalui tiga mesin pertumbuhan, yakni revitalisasi mesin ekonomi konvensional, pembangunan mesin ekonomi baru berbasis teknologi, serta peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia. Strategi tersebut diperkuat oleh stabilitas makro ekonomi, daya beli masyarakat yang terjaga, iklim investasi yang mendukung, penguatan dan pendalaman sektor keuangan, serta penguatan *social security* dan *social safety net*, sehingga efisiensi biaya logistik dapat berperan sebagai penopang utama keberlanjutan pertumbuhan dan daya saing ekonomi nasional.

“Saya ingin membangun optimisme, di tengah tantangan dan ketidakpastian global, (fundamental) ekonomi

kita masih kuat. Ke depan, peran APJP menjadi semakin penting untuk mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional, tidak hanya melalui dukungan kelancaran ekspor-impor, tetapi juga melalui kontribusi pemikiran, kajian, dan riset kebijakan guna membantu penyelesaian berbagai isu strategis kepabeanan dan logistik nasional dalam konteks yang lebih luas,” pungkask Sesmenko Susiwijono.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Dwi Teguh Wibowo, Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Susila Brata, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Bob Azam, serta pengurus dan pimpinan perusahaan anggota APJP. (nov/fsr)

**Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto**

Website: www.ekon.go.id

Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, & YouTube: @PerekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia